



KOLABORASI BNN DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN P4GN: STRATEGI DAN TANTANGANNYA

Poedji Poerwanti*

Abstrak

Prevalensi penyalahgunaan narkotika menurun, tetapi jumlah kasus yang dilaporkan justru meningkat. Hal ini menuntut pengendalian yang efektif melalui kolaborasi antara BNN dan masyarakat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Tulisan ini membahas strategi kolaborasi sebagai langkah melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, serta tantangan yang dihadapi. Strategi kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah bersih narkoba sebagai program unggulan sesuai Inpres 2/2020. Diperlukan penguatan kolaborasi yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah, instansi terkait, serta anggaran yang memadai agar program P4GN dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dan desa/kelurahan di Indonesia secara optimal. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat memastikan kelangsungan kolaborasi BNN dan masyarakat, mendorong BNN untuk meningkatkan pendampingan dan memastikan sinergi BNN dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Melalui fungsi anggaran, dapat memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan program P4GN. Selanjutnya meminta laporan perkembangan kolaborasi BNN dan masyarakat dalam pelaksanaan P4GN dalam rapat kerja.

Pendahuluan

Prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka prevalensi 1,95% dan menurun menjadi 1,73% pada tahun 2023 (Aris, 2025). Namun data Polri menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah laporan kasus narkoba. Pada tahun 2022 tercatat 44.983 orang, meningkat menjadi 50.291 orang pada tahun 2023, dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang (Polri, 2024).

Data BNN tahun 2024 mencatat bahwa jumlah pengguna narkoba yang berhasil berhenti mengalami penurunan sekitar 0,6% dari total 4,53 juta jiwa, sehingga sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba (Aris, 2025). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024, kondisi ini tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

*) Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: poedji.poerwanti@dpr.go.id

Pengendalian penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai komponen bangsa, termasuk peran aktif masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 104-Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan hak, tanggung jawab, dan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GN. Peran masyarakat tersebut dikoordinasikan oleh BNN sebagai lembaga utama dalam pelaksanaan P4GN. Tulisan ini membahas mengenai strategi kolaborasi BNN dan masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.

Strategi Kolaborasi BNN dan Masyarakat dalam Pelaksanaan P4GN

Strategi kolaborasi BNN dan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan membangun komunikasi dan koordinasi untuk memperkuat program-program P4GN. Salah satu program dalam P4GN adalah pembentukan Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (Inpres 2/2020). Program Desa Bersinar ini bertumpu pada optimalisasi sumber daya pembangunan desa.

Program lain yang menjadi kebijakan BNN dalam kolaborasi dengan masyarakat di wilayah yang lebih luas adalah program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN). Program ini dirancang sebagai strategi terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tanggap terhadap ancaman narkoba. Selain itu, BNN juga melaksanakan program Pengentasan Kawasan Rawan di Wilayah Perbatasan dan Pesisir Indonesia, yang dilakukan melalui bimbingan teknis *life skill* sebagai upaya pengembangan potensi ekonomi masyarakat di kawasan rawan. Selanjutnya, terdapat program pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dengan mendorong penerapan budidaya komoditi alternatif (BNN, 2024).

Program Desa Bersinar terus berkembang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan P4GN. Pelaksanaan program Desa Bersinar ini melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Desa sering kali dipilih sebagai lokasi program Desa Bersinar, karena memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan P4GN. Kehidupan sosial masyarakat yang erat serta kearifan lokal yang kuat, seperti nilai-nilai adat dan agama, menjadi faktor penguat dalam mentransformasikan desa tersebut menjadi wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya meningkatkan program Desa Bersinar, diterapkan skema penetapan desa/kelurahan sebagai Desa Bersinar di setiap daerah setiap tahunnya. Target ini ditetapkan oleh BNN baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Sebagai contoh BNN Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat menetapkan seluruh wilayah yang terdiri atas 124 desa/kelurahan sebagai Desa Bersinar (Eno, 2025). Kebijakan ini dipandang tepat karena Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga berpotensi menjadi daerah rawan terhadap peredaran gelap narkoba. Merujuk pada Inpres 2/2020, program P4GN dilaksanakan oleh instansi pelaksana terkait. Oleh sebab itu, program P4GN di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai bagian dari sistem interdiksi terpadu untuk memberantas peredaran narkoba melalui jalur darat.

Contoh lain adalah BNN Provinsi Maluku yang menargetkan Desa Hitu Mesing di Kabupaten Maluku Tengah dan Kelurahan Kudamati di Kota Ambon untuk menjadi Desa Bersinar. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil pemetaan BNN yang menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut termasuk dalam zona merah, yaitu daerah rawan narkoba (Dami, 2025). Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan sesuai dengan Inpres 2/2020, BNN perlu melaksanakan kampanye publik tentang bahaya narkoba dengan menyebarkan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bebas narkoba.

Selama tahun 2024, kolaborasi antara BNN dan masyarakat telah berhasil membentuk 344 Desa Bersinar dan 173 KOTAN. Secara kuantitatif, pencapaian Desa Bersinar ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Inpres 2/2020, yaitu sebanyak 121 desa/kelurahan. Meskipun demikian, program Desa Bersinar masih perlu terus ditingkatkan mengingat pelaksanaan program P4GN menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Tantangan dalam Implementasi Program P4GN

Pelaksanaan program P4GN di lapangan dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah bersih narkoba. Sebagai contoh, BNN Provinsi Kalimantan Barat sempat menunda pencaanangan salah satu desa menjadi Desa Bersinar karena belum tercapai kesepahaman dengan aparat daerah (Kuncoro, 2021). Selain itu, keterbatasan sumber daya di tingkat daerah juga menjadi hambatan. Contohnya BNN Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada tahun 2025 hanya mampu menargetkan satu Desa Bersinar di wilayahnya (Ilyas, 2024). Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran, Pada tahun 2024 BNN hanya memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.536.522.383,00 (satu triliun, lima ratus tiga puluh enam miliar, lima ratus dua puluh dua juta, tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), hal tersebut berdampak pada belum terbentuknya BNN di empat provinsi baru di tanah Papua. Selain itu, keterbatasan anggaran juga memengaruhi optimalisasi pengembangan teknologi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan P4GN (BNN, 2023).

Kolaborasi intensif antara BNN dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam memperkuat pelaksanaan program P4GN. Oleh karena itu, keikutsertaan tokoh adat dan masyarakat setempat sangat diperlukan agar program P4GN dapat berjalan secara berkesinambungan. Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, sehingga dapat menyampaikan pesan anti-narkoba secara efektif kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan kelompok seperti komunitas perempuan dan organisasi lokal juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah rawan narkoba seperti di wilayah perbatasan dan pesisir (BNN, 2024).

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pencegahan dan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas, BNN menerima peningkatan anggaran menjadi Rp2,4 triliun pada tahun 2025. Kepala BNN, Marthinus Hukom, menegaskan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat berbagai program P4GN yang telah direncanakan, termasuk program kolaborasi (BNN, 2024). Dengan penguatan anggaran, program pengembangan teknologi dan informasi yang sebelumnya sempat tertunda dapat dioptimalkan tahun ini melalui pembuatan aplikasi yang mendukung kelancaran koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga program P4GN dapat berjalan efektif dan terintegrasi.

Penutup

Kolaborasi BNN dan masyarakat sebagai komponen pendukung dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan langkah strategis untuk mewujudkan daerah bersih narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kolaborasi dalam rencana aksi nasional P4GN perlu didukung oleh komitmen pemerintah daerah, instansi terkait, serta anggaran yang memadai. Hal ini penting agar program P4GN yang menjadi target dalam Inpres 2/2020 dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dan desa/kelurahan di Indonesia secara optimal, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat memastikan agar kolaborasi antara BNN dan masyarakat terus berkelanjutan, mendorong BNN untuk meningkatkan pendampingan Desa Bersinar, KOTAN, pengentasan daerah rawan. Fungsi pengawasan juga dapat dijalankan serta memastikan sinergi antara BNN, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah bebas narkoba. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi III DPR RI dapat memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan program-program P4GN. Selanjutnya meminta laporan perkembangan kolaborasi antara BNN dan masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, dalam forum rapat kerja.

Referensi

- Aris, K. (2025, Januari 1). BNNK Way Kanan sebut ada penurunan angka prevalensi narkoba 3 tahun terakhir. *rmollampung.id*. <https://www.rmollampung.id/bnnk-way-kanan-sebut-ada-penurunan-angka-prevelensi-narkoba-3-tahun-terakhir>
- BNN. (2023, Juni 7). Komisi III DPR RI dukung penuh program kerja dan anggaran BNN RI tahun 2024. <https://bnn.go.id/komisi-iii-dpr-ri-dukung-penuh-program-kerja-dan-anggaran-bnn-ri-tahun-2024/>
- BNN. (2024, Desember 23). Tahun 2024: Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN. <https://bnn.go.id/tahun-2024-penguatan-strategi-dan-aksi-kolaborasi-dalam-p4gn/>
- BNN. (2024, Desember 14). Kepala BNN RI serahkan DIPA, tekankan amanat Presiden dan fokus anggaran 2025. <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-serahkan-dipa-tekankan-amanat-presiden-dan-fokus-anggaran-2025/>
- Dami, L. (2025, Januari 1). BNN Maluku targetkan Hitu Mesing dan Kudamati jadi desa bersih narkoba. *indoposco.id*. <https://indoposco.id/nusantara/2025/01/01/bnn-maluku-targetkan-hitu-mesing-dan-kudamati-jadi-desa-bersih-narkoba>
- Eno, D. (2025, Januari 4). Bengkayang tetapkan 124 desa bersih narkoba, BNN fokus pada P4GN. *suarakalbar.co.id*. <https://www.suarakalbar.co.id/2025/01/bengkayang-tetapkan-124-desa-bersih-narkoba-bnn-fokus-pada-p4gn/>
- Ilyas, M. (2024, Desember 28). Tahun 2025, Pemkab BS lanjutkan program desa bersinar. *radarseluma.disway.id*. <https://radarseluma.disway.id/read/688598/tahun-2025-pemkab-bs-lanjutkan-program-desa-bersinar>
- Polri. (2024, November 25). Tren jumlah kasus narkoba 2024 periode Januari-25 November 2024. [polri.go.id. https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/infografik/1732861980069.png](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/infografik/1732861980069.png)

